

DAFTAR PUSTAKA

Buku-Buku

- Alim, Muhammad, 2008, *Trias Politica Dalam Negara Madinah*, Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, Jakarta.
- Amos, H.F. Abraham, 2005, *Sistem Ketatanegaraan Indonesia: Dari Orla, Orba sampai Reformasi, Telaah Sosiologis Yuridis dan Yuridis Pragmatis Krisis Jati Diri Hukum Tata Negara Indonesia*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Anshori Saleh, Imam, 2014, “*Kandasnya Perppu Dan Masa Depan MK*”, Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial Republik Indonesia, Jakarta.
- Asshiddiqie, Jimly, 2006, *Hukum Tata Negara dan Pilar-Pilar Demokrasi: Serpihan Pemikiran Hukum, Media dan HAM*, Konstitusi Press, Jakarta.
- , 2006, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara; Jilid II*, Konstitusi Press, Jakarta.
- , 2006, *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*, Konstitusi Perss, Jakarta.
- , 2008, *Hukum Tata Negara Darurat*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- , 2008, *Menuju Negara Hukum Yang Demokratis*, Sekjen dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, Jakarta.
- , 2010, *Perihal Undang-Undang*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Azhary, Muhammad Tahir, 2004, *Negara Hukum: Suatu Studi Tentang Prinsip-Prinsipnya Dilihat Dari Segi Hukum Islam, Implementasinya Pada Periode Negara Madinah dan Masa Kini*, Prenanda Media, Jakarta.
- Bagus, Lorens, 2002, *Kamus Filsafat*, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
- Budiardjo, Miriam, 2006, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
- Busroh, Abu Daud, 2010, *Ilmu Negara*, Bumi Aksara, Jakarta.
- Community, Green Mind, 2009, *Teori dan Politik Hukum Tata Negara*, Total Media, Yogyakarta.

- Fajar, Mukti dan Yulianto, Achmad, 2010, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- Hadjon, Philipus Mandiri, 1987, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat di Indonesia (Sebuah Studi tentang Prinsip-Prinsipnya, Penanganannya oleh Pengadilan Dalam Lingkungan Peradilan Umum dan Pembentukan Peradilan Administrasi Negara*, PT Bina Ilmu Offset, Surabaya.
- Huda, Ni'matul dan Nazriyah, R., 2011, *Teori dan Pengujian Peraturan Perundang-Undangan*, Nusa Media, Bandung
- Huijbers, Theo, 1995, *Filsafat Hukum*, Kanisius, Yogyakarta.
- Husen, La Ode, 2005, *Hubungan Fungsi Pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat Dengan Badan Pemeriksa Keuangan Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia*, CV Utomo, Bandung.
- Indrati Soeprapto, Maria Farida, 2007, *Ilmu Perundang-Undangan: Jilid 1*, Kanisius, Yogyakarta.
- Kelsen, Hans, 2006, *Teori Hukum Murni: Dasar-Dasar Ilmu Hukum Normatif*, Terjemahan: Raisul Muttaqien, Nusamedia dan Nuansa, Bandung.
- Komisi Yudisial Republik Indonesia, 2008, *Komisi Yudisial dan Keadilan Sosial*, Komisi Yudisial, Jakarta.
- Librayanto, Romy, 2008, *Trias Politica Dalam Struktur Ketatanegaraan Indonesia*, PUKAP, Makasar.
- Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, 2008, *Naskah Komprehensif Perubahan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Latar Belakang, Proses, dan Hasil Pembahasan, 1999-2002; Buku II Sendi-Sendi/Fundamen Negara*, Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, Jakarta.
- Mahfud MD, Mohamad, 1999, *Hukum Dan Pilar-Pilar Demokrasi*, Gama Media, Yogyakarta.
- Manan, Bagir dan Kuntana Magnar, 1997, *Beberapa Masalah Hukum Tata Negara Indonesia*, Alumni, Bandung.
- Manan Bagir, 1999, *Lembaga Kepresidenan*, Gama Media Offset, Yogyakarta.
- Marzuki, Peter Mahmud, 2007, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta.

- Rasjidi, Lili, 1993, *Dasar-Dasar Filsafat Hukum*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Rousseau, Jean Jacques, 2007, *Du Contract Sosial (Perjanjian sosial)*, Terjemahan: Vincent Bero, Visimedia, Jakarta.
- Saifudin, 2009, *Partisipasi Publik dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan*, FH UII Press, Yogyakarta.
- Schmid, Johan Jacob Von, 1988, *Ahli-Ahli Pikir Besar Tentang Negara dan Hukum*, Terjemahan R. Wiratno dan Djamalludin D.T. Singomangkuto, PT Pembangunan, Jakarta.
- Sihombing, Herman, 1996, *Hukum Tata Negara Darurat Di Indonesia*, Djambatan, Jakarta.
- Soehino, 2005, *Hukum Tata Negara Teknik Perundang-Undangan*, Liberty, Yogyakarta.
- Soehino, 2005, *Ilmu Negara*, Liberty, Yogyakarta.
- Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji, 2007, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Soimin, 2010, “*Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Negara di Indonesia*”, UII Press Yogyakarta, Yogyakarta.
- Sumali, 2002, *Reduksi Kekuasaan Eksekutif di Bidang Peraturan Pengganti Undang-Undang*, UMM Pers, Malang.
- Sumardjono, Maria Sri Wulan, *Metodologi Penelitian Ilmu Hukum (Bahan Kuliah)*, FH UGM, Yogyakarta.
- Sunggono, Bambang, 1997, *Metodologi Penelitian Hukum*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Thaib, Dahlan, 1999, *Teori Hukum dan Konstitusi*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Yuhana, Abdy, 2007, *Sistem Ketatanegaraan Indonesia Pasca Perubahan UUD 1945: Sistem Perwakilan di Indonesia dan Masa Depan MPR RI*, Fokus Media, Bandung.

Karya Ilmiah, Skripsi, Tesis, Disertasi, Jurnal

Attamimi, Abdul Hamid Saleh, 1990, “Peranan Keputusan Presiden Republik Indonesia Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Negara: Suatu Studi Analisis Mengenai Keputusan Presiden Yang Berfungsi Pengaturan Dalam Kurun Waktu Pelita I-Pelita IV”, *Disertasi Ilmu Hukum Fakultas Pasca Sarjana Universitas Indonesia*, Jakarta.

Haryo Mahendra Putra, Reza, 2015, “Syarat Hal Ihwal Kegentingan Yang Memaksa Dalam Pembuatan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Studi Analisis Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota), *Skripsi Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah*, Jakarta.

Irwansyah, 2012, “Kedudukan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia Setelah Perubahan UUD NRI 1945 Dan Implikasi Yuridis Atas Penolakannya Oleh Dewan Perwakilan Rakyat”, *Tesis Magister Ilmu hukum Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada*, Yogyakarta.

Manan, Bagir, *Peraturan Pemerintah Sebagai Pengganti Undang-Undang*, Varia Peradilan: Majalah Hukum Tahun XXV No. 295 Juni 2010.

Siddiq, Muhammad, “*Kegentingan Memaksa Atau Kepentingan Penguasa (Analisis Terhadap Pembentukan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang)*”, *Jurnal Ilmu Syari’ah Dan Hukum*, Vol. 48. 1 Juni 2014.

Sumali, 2002, “Kedudukan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang di Dalam Ketetapan MPR No. III/MPR/2000 Dan Problema Implementasinya”, *Tesis Magister Hukum Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia*, Yogyakarta.

Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Beserta Perubahanya.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara 5234.

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur Bupati dan Walikota. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 245.

Yurisprudensi

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 003/PUU-III/2005,

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 138/PUU/VII/2009, Tanggal 8 Februari Tahun 2010.

Internet

Ahmad Soleh, “Plus Minus Pilkada Langsung dan Melalui DPRD”, www.kompasiana.com.

Damang, “Perppu Mencabut Undang-Undang?”, www.damang.web.id.

Damang, “Mempertanyakan Konstitusionalitas Perppu Pilkada”, www.negarahukum.com.

Irman Putra Sidin, “Perppu Pilkada Inkonstitusional”, www.sp.beritasatu.com.

Jimly Asshiddiqie dan Safa’at, Ali, 2006, Teori Hans Kelsen Tentang Hukum, Sekjen dan Kepaniteraan MKRI, Jakarta, www.jimly.com.

Refly Harun, “Perppu Simalakama”, www.wikidpr.org.

Riri Nazriyah, Kewenangan Mahkamah Konstitusi Dalam Menguji Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang, Jurnal Hukum No. 3 Vol. 17 Juli 2010.

Saldi Isra, “Persetujuan Perppu Pilkada”, www.sindonews.com, diakses tanggal 13 Maret 2017.

“Apakah Setiap Lembaga Negara Berwenang Membentuk Peraturan Perundang-Undangan?”, www.hukumonline.com.